



LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2023

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang mana atas karunia-Nya sehingga terselesaikannya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan terdapat kekurangan serta kendala yang dihadapi dalam rangka memenuhi Sistem Akuntansi yang transparan dan Akuntabel, namun hal tersebut merupakan motivasi untuk memacu Unit SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk terus berbenah memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada. Perlu kita sadari disini bahwa untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih (Good Governance) tidak akan berhasil apabila penyelenggaraan sistem manajemen keuangan tidak terlaksana dengan baik.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023 berusaha semaksimal mungkin untuk mengacu kepada ketentuan tersebut, namun masih ada dirasa banyak kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Tuapejat, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dedius Saleh, S.Pd, MM

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19741006 200112 1003

Kata Pengantar		i
Pernyataan Tanggung Jawab		li
Daftar Isi		lii
RINGKASAN EKSEKUTIF		v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
LAPORAN OPERASIONAL		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
NERACA		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)				
BAB I	Pendahuluan			1
	1.1	Informasi Umum		1
	1.2	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan		4
	1.3	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan		6
	1.4	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan		7
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan			11
	2.1	Indikator Ekonomi Makro		11
	2.2	Kebijakan Akuntansi		11
	2.3	Indikator Perencanaan Target Kinerja APBD		12
BAB III	Gambaran Keadaan yang diinginkan			14
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang telah ditetapkan		14
		3.1.1	Pendapatan	
		3.1.2	Belanja	
	3.2	Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan		17
BAB IV	Kebijakan Akuntansi			18
	4.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah		18
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan		19
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan		19
	4.4	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan		30
BAB V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan			32
	5.1	Penjelasan Laporan Realisasi Keuangan (LRA)		32
		5.1.1	Penjelasan Pendapatan	
		5.1.2	Penjelasan Pos-Pos Belanja	
		5.1.3	Belanja Operasi	
			a. Belanja Pegawai Belanja tidak langsung dan belanja pegawai belanja langsung	
			b. Belanja Barang dan Jasa	
		5.1.4	Belanja Modal	
		5.1.5	Penjelasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan (SILPA)	
	5.2	Penjelasan Laporan Operasional (LO)		35
		5.2.1	Penjelasan Pendapatan LO	
		5.2.2	Penjelasan Beban Operasi LO	
			5.2.2.1 Beban Pegawai	

			5.2.2.2 Beban Persediaan		
			5.2.2.3 Beban Jasa		
			5.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas		
			5.2.2.5 Beban Pemeliharaan		
	5.3	Penjelasan Perbedaan LO dengan LRA			39
	5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)			42
	5.5	Penjelasan Pos Neraca			42
		5.5.1	Aset		
			5.5.1.1 Aset Lancar		
			5.5.1.2 Aset Tetap		
			5.5.1.3 Aset Lainnya		
		5.5.2	Kewajiban		
		5.5.3	Ekuitas		
BAB VI	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan				50
BAB VII	Penutup				51
LAMPIRAN					
-	Laporan Fungsional Tahun 2023				
-	Rekening Koran Januari s.d Desember 2023				
-	Laporan Persediaan Barang (Stock Opname) Januari s.d Desember 2023				
-	Rekapitulasi Barang ke Neraca				
-	Laporan Akumulasi Penyusutan				
-	Bukti Setoran STS UYHD				
-	Register SP2D				

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SATUAN KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tuapejat, 05 Januari 2024

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Dominikus Saleleubaja, S.Pd, MM

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19741006 200112 1003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan atau barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Laporan Keuangan Satuan Kerja Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Laporan ini terdiri dari :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2022 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 20.605.000,00 dari anggaran Rp. 25.000.000,00. Realisasi Belanja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.174.682.684,00 dari anggaran Rp. 8.340.135.139,00

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menjelaskan realisasi belanja operasi sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar (Rp. 12.417.857.032,00)

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penerunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo akhir perubahan ekuitas sebesar Rp. 147.146.302.527,00

4. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2019 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset adalah sebesar Rp. 147.146.302.527,00Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 0,00 sedangkan Jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp. 147.146.302.527,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang di perlukan

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang disajikan secara benar dan wajar yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, wakil rakyat dan lembaga pengawas, investor dan kreditor, manajemen dan aparat pemerintah, lembaga donor dan lembaga internasional serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan memiliki tujuan, yaitu:

Tujuan Umum: menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan khusus: untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas daya yang di percayakan kepadanya, dengan:

- menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah,
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah,
- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi,

- menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
- menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai aktivitasnya.

Laporan keuangan tahun 2020 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan (Eselon IV) mempunyai tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut:

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diatas

Sub Bagian Keuangan memiliki Tugas Mengelola administrasi Keuangan dan Akuntansi dalam lingkungan Dinas Tugas Sub bagian Keuangan meliputi

b. Uraian Tugas Sub bagian Program dan Keuangan meliputi :

Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Mekanisme kerja di bagian keuangan yaitu dimulai dari akuntansi pengeluaran kas yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung dan pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020;

- 21) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 21) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2018;
- 22) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 142 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Pemeritahan serta informasi lainnya yang diperlukan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2020 meliputi hal-hal berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Lapoan Keuangan

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja keuangan pemerintah
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing pos – pos pelaporan keuangan pemerintah Daerah
 - 3.1.1 Pendapatan - LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan - LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD

BAB V Penutup

LAMPIRAN

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Tahun anggaran 2023 OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai merencanakan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 16.575.000,- yang terealisasi Rp. 20.717.500,- sedangkan Belanja Daerah untuk sejumlah Rp. 11.948.061.724,- direncanakan untuk membiayai:

❖	Belanja Pegawai	Rp. 2.412.113.224,-
❖	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.704.501.050,-
❖	Belanja Modal	Rp. 1.831.447.450,-

Realisasi kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2023 sebesar Rp. 8.289.823.088,- (69.38%) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

❖	Belanja Pegawai	Rp 2.289.874.071,- (94.93%)
❖	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.945.138.437,- (77.16%)
❖	Belanja Modal	Rp. 54.810.580,- (2.99%)

secara keseluruhan pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih baik. Pencapaian target kinerja keuangan ini merupakan implementasi kinerja seluruh personil yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di unit OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama pihak terkait, baik Pemerintah, Pihak Swasta dan Masyarakat. Namun secara langsung pencapaian target kinerja ini tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan.

3.1.1 Pendapatan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merencanakan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 16.575.000,- yang terealisasi Rp. 20.717.500,- (124.99%).

3.1.2 Belanja

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
I	Belanja Operasi	10.116.614.274,00	8.235.012.508,00	81.40	1.881.601.766,00
1	Belanja Pegawai	2.412.113.224,00	2.289.874.071,00	94.93	122.239.153 ,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.704.501.050,00	5.945.138.437,00	77.16	1.759.362.613 ,00
II	Belanja Modal	1.831.447.450,00	54.810 580,00	2.99	1.776.636.870 ,00

3.1.3 Pendapatan – LO

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 16.575.000,- yang terealisasi Rp. 20.717.500,- (124.99%) sama dengan realisasi pendapatan LRA

3.1.4 Beban - LO

No	Uraian Beban	LRA	LO	Lebih/Kurang
1	Beban Pegawai	2.225.744.071	2.225.744.071	0.00
2	Beban Persediaan	3.375.390.319	3.378.290.099	2.899.788
3	Beban Jasa Kantor	962.669.795	962.669.795	0.00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	82.434.000	82.434.000	0.00
5	Beban Sewa Gedung Bangunan	12.750.000	12.750.000	0.00
6	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	149.190.002	149.190.002	0.00
7	Beban Perjalanan dinas	1.022.047.037	1.022.047.037	0.00
8	Beban Pemeliharaan	20.757.784	20.757.784	0.00
9	Beban Kursus Pelatihan	348.269.500	348.269.500	0.00
10	Beban Uang dan atau Jasa diberikan kepada Pihak ketiga, pihak lain,	35.760.000,00	35.760.000,00	0.00

	Masyarakat			
--	------------	--	--	--

3.1.5 Asset

No	Uraian Asset	LRA
1	Tanah	406.488.300
2	Peralatan dan Mesin	2.915.321.960
3	Gedung dan Bangunan	22.823.482.905
4	Jalan, Irigasi dan Jaringannya	141.471.337.293
5	Asset Tetap Lainnya	23.708.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	34.980.000
7	Akumulasi Penyusutan	(20.537.910.222)

3.1.6 Kewajiban

Nilai Kewajiban Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah 0.00

3.1.7 Ekuitas Dana

Perkiraan	31 DESEMBER 2023
Ekuitas Awal	151.145.855.569,00
Penambahan Ekuitas dari LO	
Surplus/Defisit LO	(12.417.857.032.,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	-
Mutasi Aset	0,00
Koreksi saldo awal aset tetap	-
Koreksi aset lainnya – barang rusak berat	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-
Koreksi Akumulasi penyusutan aset lainnya	

Koreksi akumulasi penyusutan	
Koreksi amortisasi aset tidak berwujud	
Penghapusan Aset Rusak Berat	
Penghapusan Aset melalui TPTGR	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.418.303.990,00
Ekuitas Akhir	147.146.302.527,00

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 mengalami hambatan karena persentase fisik mencapai 69.30% dikarenakan keterlambatan dalam pelaksanaan atau menjalankan kegiatan .



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNTUK TAHUN 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1.1 Pendapatan

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 31 DESEMBER 2023	%	31 DESEMBER 2022
1	Pendapatan	16.575.000,00	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 124,99% dari anggarannya.

1.2 Pos-Pos Belanja

1.2.1 Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pegawai Belanja Langsung

Merupakan anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 dan per 31 DESEMBER 2022. Untuk realisasi 31 DESEMBER Tahun 2023 mencapai 81.40% dari anggarannya. Dibandingkan Tahun anggaran 31 DESEMBER 2022 sebesar 85.91 % terdapat peningkatan sebesar 4.51 %. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji PNS, tambahan penghasilan PNS, honorarium PNS dan Honorarium non PNS.

NO	PERKIRAAN	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Realisasi 31 DESEMBER 2022
1	Belanja Pegawai	2.289.874.071,00	1.407.892.155,00

❖ **Rincian belanja pegawai belanja tidak langsung**

- Rincian beban gaji dan beban tunjangan

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.130.505.900,00
2.	Tunjangan Keluarga	119.939.422,00

3.	Tunjangan Jabatan	128.620.000,00
4.	Tunjangan Fungsional Umum	26.315.000,00
5.	Tunjangan Beras	70.392.240,00
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.587.341,00
7.	Pembulatan Gaji	17.038,00
Jumlah		1.481.376.941,00

- Beban Tambahan Penghasilan PNS

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	378.253.827,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	8.056.217,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	358.057.086,00
Jumlah		744.367.130,00

❖ Rincian belanja pegawai belanja langsung

NO	PERKIRAAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023
1	Honorarium PNS	313.285.000,00
2	Honorarium Non PNS	392.124.000,00
	Jumlah	705.409.000,00

- Rincian Honorarium PNS

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara	249.155.000,00
2.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00
3.	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	34.200.000,00
4.	Honorarium Petugas Pengelola Barang Daerah	26.730.000,00
Jumlah		313.285.000,00

- Rincian Honorarium Non PNS

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	115.524.000,00
2.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0.00
3.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.000.000,00
4.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000,00
5.	Belanja Jasa Operator Kapal	31.200.000,00

6.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.400.000,00
7.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	84.000.000,00
8.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0.00
Jumlah		392.124.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa 31 DESEMBER Tahun 2023 dan 31 DESEMBER 2022. Untuk realisasi 31 DESEMBER 2023 mencapai 77.16% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi 31 DESEMBER 2022 mencapai 83.93% terdapat penurunan sebesar 6.77% diakibatkan anggaran yang meningkat dan waktu yang terbatas untuk menjalankan kegiatan

Belanja Barang dan jasa ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 31 DESEMBER 2023	Realisasi 31 DESEMBER 2023	%	Realisasi 31 DESEMBER 2022
1	Belanja Barang dan Jasa	7.704.501.050,00	5.945.138.437,00	77.16	4.617.409.296,00
2	Belanja bahan pakai habis	3.729.836.600,00	3.375.390.319,00	90.50	1.472.512.435,00
3	Belanja jasa kantor	1.429.838.000,00	898.539.795,00	62.84	973.225.199,00
4	Belanja sewa peralatan dan mesin	86.527.000,00	82.434.000,00	95.27	59.309.000
5	Belanja sewa gedung dan bangunan	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00	9.350.000
6	Belanja jasa konsultasi konstruksi	235.347.550,00	149.190.002,00	63.39	22.255.950
7	Belanja kursus/pelatihan,sosia lisai,bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	697.300.000,00	302.705.500,00	43.41	290.096.371
8	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	20.757.784,00	98.85	113.542.621
9	Belanja Perjalanan dinas	1.055.042.000,00	1.022.047.037,00	96.87	1.677.117.720
10	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	35.760.000,00	35.760.000,00	100	0,00

	Jumlah				2.871.770.558,00

1.2.2 Belanja Modal

N o	Uraian	Anggaran 31 DESEMBER 2023	Realisasi 31 DESEMBER 2023	%	31 DESEMBER 2022
1	Belanja Modal	1.831.447.450,00	54.810.580,00	2.99	130.616.999,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal 31 DESEMBER Tahun 2023 dan 31 DESEMBER 2022. Realisasi 31 DESEMBER Tahun 2023 mencapai 2.99% dari anggarannya. Dan untuk bulan 31 DESEMBER 2022 mencapai 92.53 % dari anggarannya dan mengalami peningkatan sebesar 89.54%.

1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	31 DESEMBER 2023 Rp. (3.662.381.136,00)	31 DESEMBER 2022 Rp. (1.086.965.175,00)
--	---	---

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai 31 DESEMBER Tahun 2023 sebesar Rp. (3.662.381.136,00)) dengan perhitungan sebagai berikut :

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 31 DESEMBER Tahun 2023 sebesar Rp. (3.662.381.136,00).

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI					
RINGKASAN REALISASI APBD					
TAHUN ANGGARAN 2023					
Urusan Organisasi : 3.07 - Perindustri					
Organisasi : 3.07.01.00 - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		LEBIH (KURANG)	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN DAERAH	16,575,000.00	20,717,500.00	(4,142,500.00)	124.99
2	BELANJA DAERAH	11,948,061,724.00	8,289,823,088.00	3,658,238,636.00	69.38
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,412,113,224.00	2,289,874,071.00	122,239,153.00	94.93
2.1.1	Belanja Pegawai	2,412,113,224.00	2,289,874,071.00	122,239,153.00	94.93
2.2	BELANJA LANGSUNG	9,535,948,500.00	5,999,949,017.00	3,535,999,483.00	62.92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,704,501,050.00	5,945,138,437.00	1,759,362,613.00	77.16
2.2.3	Belanja Modal	1,831,447,450.00	54,810,580.00	1,776,636,870.00	2.99
	Jumlah Belanja	11,948,061,724.00	8,289,823,088.00	3,658,238,636.00	69.38
	Surplus/Defisit	(11,931,486,724.00)	(8,269,105,588.00)	(3,662,381,136.00)	69.30
	SILPA	(11,931,486,724.00)	(8,269,105,588.00)	(3,662,381,136.00)	69.30

2. Laporan Operasional (LO)

2.1 Pendapatan

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	20.717.500,00	20.605.000,00
Pendapatan Hibah Tanah Pasar sao	0,00	0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Tahun 2023. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Retribusi daerah sebesar 20.717.500,00

2.2 Beban Operasi LO

2.2.1 Beban Pegawai

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Beban Pegawai		2.426.656.389,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, dan Uang Lembur-LO, yaitu :

No	Perkiraan	Nilai
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	1.481.376.941,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	744.367.130,00
	Jumlah	2.289.874.071,00

❖ Rincian beban gaji dan beban tunjangan

Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.426.656.389,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.130.505.900,00
2.	Tunjangan Keluarga	119.939.422,00
3.	Tunjangan Jabatan	128.620.000,00
4.	Tunjangan Fungsional Umum	26.315.000,00
5.	Tunjangan Beras	70.392.240,00

6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.587.341,00
7.	Pembulatan Gaji	17.038,00
Jumlah		1.481.376.941,00

❖ **Beban Tambahan Penghasilan PNS**

Beban Tambahan penghasilan sebesar Rp. 941.664.234,00 terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	378.253.827,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	8.056.217,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	358.057.086,00
Jumlah		744.367.130,00

2.2.2 Beban persediaan

Uraian	31 DESEMBER 2022	Penambahan	Pengurangan	31 DESEMBER Tahun 2023
Beban Persediaan	1.468.974.050,00	3.375.390.319,00	627.000,00	3.378.290.099,00

Pengakuan beban persediaan sebesar Rp. 3.378.290.099,00 terdiri dari :

1. **Beban Bahan Pakai Habis** sebesar Rp. 327.021.728,00 terdiri dari :

Bahan Bakar dan Pelumas	107,152,590.00
Belanja bahan - bahan lainnya	575,000.00
Alat Tulis Kantor	78,329,480.00
Kertas dan Cover	31,599,100.00
Bahan Cetak dan Penggandaan	31,484,860.00
Benda Pos	2,970,000.00
Perabot Kantor	4,893,600.00
Alat Listrik	-

2. **Beban bahan / material** sebesar Rp. 0,00 terdiri dari :

- ❖ **Beban perlengkapan Kantor** Rp.,00
- ❖ **Beban Perlengkapan Dinas** Rp. 0,00

3. Beban Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 80.964.600,00 terdiri dari :
 - ❖ Beban cetak Rp 41.804.600,00
 - ❖ Beban penggandaan Rp. 39.160.000,00
4. Makan Minum sebesar Rp. 162.657.700,00 terdiri dari :
 - ❖ Natura dan Pakan Natura Rp. 18.910.200,00
 - ❖ Beban makanan dan minuman rapat Rp. 143.747.500,00
5. Beban belanja obat-obatan Rp. 00,00 terdiri dari:
 - ❖ Belanja Obat-obatan Rp. 0,00
6. Beban Belanja Bahan Komputer Rp. 0,00 terdiri dari :
 - ❖ Belanja Bahan Komputer Rp. 0,00
7. Barang yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 892.841.422,00 terdiri dari:
 - ❖ Barang Tersedia Untuk diserahkan kepada Masyarakat Rp. 892.841.422,00
8. Saldo Persediaan 31 DESEMBER 2022 sebesar Rp. 1.223.295,00 terdiri dari :
 - ❖ Alat tulis kantor Rp. 910.000,00
 - ❖ Alat listrik dan elektronik Rp.313.000,00
 - ❖ Perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 0,00
 - ❖ Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 0,00
 - ❖ Bahan bakar minyak / gas Rp.0,00
 - ❖ Makanan dan minuman harian pegawai Rp.0,00
 - ❖ Cetak dan Penggadaan Rp. 0,00
9. Saldo Persediaan 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 3.526.780,00 terdiri dari :
 - ❖ Alat tulis kantor Rp. 2.562.780,00
 - ❖ Alat listrik dan elektronik Rp.0,00
 - ❖ Perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 0,00
 - ❖ Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 0,00
 - ❖ Bahan bakar minyak / gas Rp.0,00
 - ❖ Makanan dan minuman harian pegawai Rp.0,00
 - ❖ Cetak dan Penggadaan Rp. 964.000,00

2.2.3 Beban Jasa

Uraian	31 DESEMBER 2023	Belanja Modal tidak menjadi aset	Jumlah Rp.
Beban Jasa		0,00	1.141.240.149,00

Pengakuan beban jasa sebesar Rp.1.141.240.149,00 terdiri dari :

1. Beban Jasa Kantor sebesar Rp.260.300.666,00 terdiri dari :
 - ❖ Beban listrik Rp.30.016.066,00
 - ❖ Beban surat kabar/majalah Rp. 11.000.000,00
 - ❖ Beban kawat/faksimili/internet Rp 2.068.300,00
 - ❖ Beban jasa narasumber Rp.152.400.000 ,00
 - ❖ Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp. 57.000.000,00
 - ❖ Beban jasa tim penyusunan buletin, majalah, pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp.4.200.000,00
 - ❖ Belanja Pembyaran Pajak, Bea , Perizinan Rp. 3.616.300,00
2. Beban premi asuransi sebesar Rp. 0,00 terdiri dari :
 - ❖ Beban premi asuransi kesehatan Rp. 0,00
3. Beban Sewa rumah /gedung /gudang/parkir sebesar Rp. 9.350.000,00 terdiri dari :
 - ❖ Beban sewa gedung kantor/tempat kerja lainnya Rp. 9.350.000,00
4. Beban sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 59.309.000,00 terdiri dari :
 - ❖ Beban sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 2.500.000,00
 - ❖ Beban sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp. 20.000.000,00
 - ❖ Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp. 36.809.000,00
5. Beban Honorarium PNS Rp. 77.100.000,00 terdiri dari :
 - ❖ Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 30.000.000,00
 - ❖ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 15.480.000,00

- ❖ Honorarium Pengelolaan BMD Rp. 31.620.000,00
 - ❖ Honorarium petugas pengelola keuangan Rp. 0,00
 - ❖ Honorarium petugas pengelola barang daerah Rp. 0,00
6. Beban Honorarium Non PNS Rp.604.689.533,00 terdiri dari :
- ❖ Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 82.906.000,00
 - ❖ Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 41.184.000,00
 - ❖ Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 147.170.000,00
 - ❖ Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 25.500.000,00
 - ❖ Belanja Jasa Operator Kapal Rp. 31.200.000,00
 - ❖ Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 68.813.333,00
 - ❖ Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 207.916.200,00
7. Jasa Kalibrasi Rp. 108.235.000,00 terdiri dari :
- ❖ Jasa Kalibrasi Rp. 108.235.000,00
8. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Rp. 22.255.950,00
- ❖ Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya Rp. 7.020.000,00
 - ❖ Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Rp. 5.100.450,00
 - ❖ Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur Rp. 4.678.000,00
 - ❖ Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Rp. 5.457.500,00

2.2.4 Beban Perjalanan dinas

Pengakuan Beban perjalanan dinas sebesar Rp. 1.677.117.720,00 terdiri dari :

- ❖ Beban perjalanan dinas biasa Rp. 904.091.620,00
- ❖ Beban Perjalanan Dinas Tetap Rp. 12.290.000,00
- ❖ Beban perjalanan dinas dalam kota Rp. 760.736.100,00

2.2.5 Beban Pemeliharaan

Pengakuan beban pemeliharaan sebesar Rp. 113.542.621,00 terdiri dari :

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 26.768.027
2. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.86.774.594,00
3. Belanja Jasa Service Rp. 17.360.000,00

2.2.6 Beban Pelatihan

Pengakuan Beban Pelatihan /Kursus Singkat sebesar Rp 290.096.371,00, terdiri dari:

- ❖ Belanja Kursus Singkat/ pelatihan Rp. 258.338.200,00
- ❖ Belanja Bahan Sosialisasi Rp. 31.758.171,00

2.2.7 Beban Amortisasi dan Penyusutan

Beban penyusutan per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 2.125.596.270,00, sedangkan akumulasi beban penyusutan hingga 31 DESEMBER Tahun 2023 sebesar Rp 14.218.535.307,00 (empat belas milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Akumulasi penyusutan 31 DESEMBER 2022	Penyusutan 31 DESEMBER 2023	Jumlah
1	2	3	4	(3+4)
1	Peralatan dan Mesin	263.067.277,00		
2	Gedung dan Bangunan	448.923.825,00		
3	Jalan, irigasi dan Jaringan Instalansi	3.534.880.182,00		
	Jumlah	4.266.871.284,00		

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar penyusutan aset tetap Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran.

Untuk beban amortisasi 31 DESEMBER tahun 2023 sebesar Rp. 0,00.

2.2.8 Pengakuan Beban LO

Beban Operasional LO 31 DESEMBER Tahun 2023 sebesar Rp.10.106.834.895,00 (Sepuluh Milyar Seratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Jumlah Belanja Operasional -LO dapat dirincikan sbb:

Objek BelanjaLO	Beban Brg&Jasa LO
Beban pegawai	
Beban persediaan	
Beban jasa	
Beban perjalanan dinas	
Beban pemeliharaan	
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	
Sewa Gedung dan Bangunan	
Sewa Jasa Konsultasi Konstruksi	
Beban Kursus dan Pelatihan	
Beban Penyusutan	
Beban Subsidi	
Beban Lain-lain	
Jumlah	

2.3 Surplus Defisit LO

Surplus Defisit LO merupakan jumlah biaya operasi LO dikurangi pendapatan LO sebesar Rp. 8.874.545.899,00. untuk rincian dapat dilihat pada lampiran Laporan Operasional (LO).

4. Perbedaan LO dan LRA

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Beban pegawai			
Beban persediaan			
Beban jasa			
Beban perjalanan dinas			
Beban pemeliharaan			
Beban Kursus, Pelatihan			
Beban Penyusutan			
Beban Peralatan dan Mesin			
Beban Beban Gedung dan Bangunan			
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi			
Jumlah			

a. Beban Penyusutan

Beban penyusutan per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. **4.197.780.426,00**, sedangkan akumulasi beban penyusutan hingga 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp 20.537.728.404,00 (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Uraian	Akumulasi penyusutan 31	31 DESEMBER	Jumlah
----	--------	-------------------------	-------------	--------

		DESEMBER 2022	2023	
1	2	3	4	(3+4)
1	Peralatan dan Mesin	263.067.277,00	212.046.180,00	475.113.457,00
2	Gedung dan Bangunan	448.923.825,00	450.854.064,00	899.777.889,00
3	Jalan, irigasi dan Jaringan Instalansi	3.534.880.182,00	3.534.880.182,00	7.069.760.364,00
	Jumlah	4.246.871.284,00	4.197.780.426,00	8.444.651.710,00

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar penyusutan aset tetap Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran.

b. Beban Lain-lain

Penyesuaian mengakui beban lain-lain per 30 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 0,00

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	31 DESEMBER 2023
Ekuitas Awal	151.068.354.727,00
Penambahan Ekuitas dari LO	
Surplus/Defisit LO	(12.538.743.064,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	-
Mutasi Aset	149.198.402,00
Koreksi saldo awal aset tetap	-
Koreksi aset lainnya – barang rusak berat	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-
Koreksi Akumulasi penyusutan aset lainnya	

Koreksi akumulasi penyusutan	
Koreksi amortisasi aset tidak berwujud	
Penghapusan Aset Rusak Berat	
Penghapusan Aset melalui TPTGR	139.029.850,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.269.105.588,00
Ekuitas Akhir	147.277.065.086,00

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal sebesar 151.068.354.727,00 adalah saldo Ekuitas akhir berdasarkan Neraca per 31 DESEMBER 2022
2. Surplus/Defisit LO sebesar (12.538.743.064,00) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO 31 DESEMBER 2023
3. Mutasi aset sebesar Rp. 149.198.402,00
4. Koreksi saldo awal aset tetap Rp. 0,00
5. Koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 0,00
6. Penghapusan Aset rusak berat sebesar Rp.0,00
7. Penghapusan aset melalui TPTGR sebesar Rp. 139.029.850,00
8. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 8.269.105.588,00
9. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 147.277.065.086,00 adalah saldo Ekuitas Dinas Koperindag per 31 DESEMBER 2023

5. NERACA

5.1 Aset

5.1.1 Aset Lancar	31 DESEMBER 2023 (Rp.)	31 DESEMBER 2022 (Rp.)
	627.000,00	214.910.780,00

Aset lancar per 31 DESEMBER 2023 adalah sebesar Rp 214.910.780,00 terdiri dari dari kas, piutang, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar dimuka, penyisihan piutang dengan penjelasan sebagai berikut :

Aset lancar	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	(Rp.)	(Rp.)
Kas dan bank	-	-
Piutang	-	-
Piutang lain-lain	-	-
Persediaan	627.000,00	3.526.780,00
Biaya dibayar dimuka	-	-
Penyisihan piutang	-	-
Jumlah	627.000,00	3.526.780,00

Nilai saldo kas dan bank per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 0,00, sedangkan persediaan di bulan 31 DESEMBER sebesar Rp. 3.526.780,00 merupakan saldo buku kas di kas daerah ditambah dengan kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran, serta kas lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas dan Bank	31 DESEMBER 2023 (Rp.)	31 DESEMBER 2022 (Rp.)
Kas di bendahara penerimaan	-	-
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Kas lainnya	-	-
Jumlah	0,00	0,00

❖ Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 0,00.

❖ Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 0,00

Terdiri dari :

Keterangan	31 DESEMBER 2023
------------	------------------

	(Rp)
1. Saldo di Kas Tunai	0,00
2. Panjar PPTK	0,00
3. SP2D yang belum dicairkan	0,00
4. Saldo Di Bank	0,00
Total	0,00

❖ Kas Lainnya

Saldo kas lainnya per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 0,00

b. Piutang	31 DESEMBER 2023 (Rp.)	31 DESEMBER 2022 (Rp.)
	0,00	0,00

Saldo piutang per tanggal 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 0,00

c. Persediaan	31 DESEMBER 2023 (Rp.)	31 DESEMBER 2022 (Rp.)
	627.000,00	3.526.780,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 DESEMBER 2023. Persediaan dicatat menggunakan perhitungan fisik pada akhir periode dan diukur dengan biaya perolehan. Saldo persediaan per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 3.526.780,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp. 3.526.780,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	<u>Rp. 3.375.390.319,00</u>
Jumlah	Rp. 3.378.917.099,00
Pengurangan 31 DESEMBER 2023	<u>Rp. 3.378.290.099,00</u>
Saldo per 31 DESEMBER 2023	Rp. 627.000,00

Saldo Persediaan per 31 DESEMBER 2023 dengan rincian:

NO	Keterangan	31 DESEMBER 2023
1	Alat Tulis Kantor	627.000,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	0.00
3	Perangko, Materai dan benda pos lainnya	0.00
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0.00
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	0.00
6	Cetak dan Penggandaan	0.00
7	Makan Minum	0.00
8	Barang yang diserahkan kemasyarakat	0.00
	Jumlah	627.000.00

Keterangan Stok Opname dapat dilihat di lampiran

d. Biaya dibayar dimuka

31 DESEMBER

31 DESEMBER

2023

2022

(Rp.)

(Rp.)

0,00

0,00

Saldo beban dibayar di muka per 31 DESEMBER 2023 sebesar Rp. 0,00

5.1.2 Aset Tetap 2022	31 DESEMBER 2023	31 Desember
	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
	147.137.408.236,00	151.056.560.656,00

Nilai saldo aset per 31 DESEMBER 2023 adalah sebagai berikut :

Nilai perolehan aset per 31 DESEMBER 2022	Rp.	151.056.560.656,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>16.618.759.802,00</u>
Jumlah	Rp.	167.675.320.458,00
Penyusutan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>(20.537.912.222,00)</u>

Saldo aset tetap per 31 DESEMBER 2023 Rp. 147.137.408.236,00
Aset tetap Dinas Koperindag per 31 DESEMBER 2023 tersebut meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya

Tabel rincian aset tetap per 31 DESEMBER 2023

No	URAIAN	31 DESEMBER 2022	MUTASI	31 DESEMBER 2023
1.	ASET TETAP			
	Tanah	406.488.300,00		
	Peralatan dan Mesin	2.863.211.380,00		
	Gedung dan Bangunan	22.596.646.004,00		
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.471.337.293,00		
	Aset Tetap Lainnya	23.708.000,00		
	Konstruksi dalam Pengerjaan	34.980.000,00		
	Akumulasi Penyusutan			
	- S/D Tahun 31 DESEMBER 2022	(16.339.810.321,00)		
	Jumlah Aset Tetap	155.256.447.440,00		

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Tanah		406.488.300,00

Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp.	406.488.300,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	406.488.300,00
Pengurangan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Nilai aset tanah 31 DESEMBER 2023	Rp.	406.488.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan per 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022. Daftar Tanah per 31 DESEMBER 2023 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Koperindag yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Koperindag Tahun 2023.

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
b. Peralatan dan Mesin		2.863.211.380,00
Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp.	2.863.211.380,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	Rp.	

Jumlah	Rp.
Pengurangan 31 DESEMBER 2023	Rp.
Nilai aset peralatan dan mesin 31 DESEMBER 2023	Rp.

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin yang terdaftar pada Dinas Koperindag per 31 DESEMBER 2023 terdiri dari :

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
c. Gedung dan Bangunan		22.596.646.004,00
Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp.	22.596.646.004,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	22.596.646.004,00
Pengurangan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>(0,00)</u>
Nilai aset gedung dan bangunan 31 DESEMBER 2023	Rp.	22.596.646.004,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat per 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022.

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan		141.471.337.293,00

Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp.	141.471.337.293,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	141.471.337.293,00
Pengurangan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Nilai aset jalan. Irigasi dan jaringan 31 DESEMBER 2023	Rp.	141.471.337.293,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 DESEMBER 2023.

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
e. Aset Tetap Lainnya	23.708.000,00	23.708.000,00
Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp.	23.708.000,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	23.708.000,00
Pengurangan 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Nilai aset tetap lainnya 31 DESEMBER 2023	Rp.	23.708.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 DESEMBER 2023

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	34.980.000,00	34.980.000,00
Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp.	0,00
Penambahan 31 DESEMBER 2023	Rp.	
Jumlah	Rp.	<u>34.980.000,00</u>
Pengurangan 31 DESEMBER 2023	Rp.	34.980.000,00
Nilai aset KDP 31 DESEMBER 2023	Rp.	<u>(0,00)</u>
		34.980.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdaftar pada Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai 31 DESEMBER 2023.

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
g. Akumulasi Penyusutan	(20.537.728.404,00)	(16.339.810.321,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan yang terdaftar pada Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun per 31 DESEMBER 2023

*	Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	2.522.613.494,00
*	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.573.801.652,00
*	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.441.313.258,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 DESEMBER 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Penjelasan Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada daftar penyusutan Aset Tetap.

5.1.3 Aset Lainnya

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	49.500.000,00	49.500.000,00

A. Aset Tidak Berwujud

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset tidak berwujud yang terdaftar pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat per 31 DESEMBER 2023.

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
B Koreksi Amortisasi	(49.500.000,00)	(49.500.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo koreksi amortisasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat per 31 DESEMBER 2023.

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
C Aset Lain-lain	8.267.291,00	8.267.291,00
- Barang Hilang	0,00	0,00
- Barang dalam penelusuran	0,00	0,00
- Barang rusak berat	2.071.404.450,00	2.071.404.450,00
- Akumulasi penyusutan aset lainnya	(2.0631.371.590,00)	(2.0631.371.590,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat per 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022. Penjelasan Aset lain-lain dapat dilihat di daftar berita acara Barang Milik Daerah.

5.2 Kewajiban

5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Utang Belanja	0,00	0.00

Jumlah tersebut merupakan utang belanja pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat per 31 DESEMBER 2023. Jumlah tersebut berkurang sebesar Rp. 0,00.

5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Utang Belanja	0,00	0.00

Jumlah tersebut merupakan utang belanja pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat per 31 DESEMBER 2023. Jumlah tersebut berkurang sebesar Rp. 0,00

5.3 EKUITAS

Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Ekuitas	147.277.065.086,00	151.068.354.727,00

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat per 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022, perhitunganya sebagai berikut :

Saldo per 31 DESEMBER 2022	Rp.	151.068.354.727,00
----------------------------	-----	--------------------

Surplus / Defisit LO 2023	Rp.	(12.538.743.064,00)
Setoran UYHD tahun lalu	Rp.	0,00
Mutasi Aset	Rp.	149.198.402,00
Koreksi saldo awal aset tetap	Rp.	0,00
Koreksi akumulasi penyusutan	Rp.	0,00
Koreksi amortisasi aset tidak berwujud	Rp.	0,00
Penghapusan aset Rusak Berat	Rp.	0,00
Penghapusan Aset melalui TPTGR	Rp.	139.029.850,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan		<u>8.269.105.588,00</u>
Nilai Ekuitas 31 DESEMBER 2023		147.277.065.086,00

b. RK PPKD

Jumlah tersebut merupakan RK PPKD pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat 31

D	Perkiraan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
E			
\$		0,00	0,00

EMBER tahun 2023 dan 30 31 DESEMBER 2022 sebesar Rp. 0,00.

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menguatkan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, walaupun belum memberikan realisasi yang maksimal dikarenakan keterlambatan menjalankan kegiatan.

Semoga kedepannya Dinas Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan dapat memaksimalkan hasil realisasi kinerjanya.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki kinerja yang baik dengan persentase 69.30%. Disisi Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat melaksanakannya dengan secara efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan keuangan tahun 2023 ini, mengacu pada undang-undang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Hal ini telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Diharapkan semua pihak yang berkepentingan umumnya, pada BKDKabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dapat mempergunakannya untuk bahan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam pembuatan laporan keuangan ini, mungkin tidak sesempurna yang diharapkan, karena disana sini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun untuk masa yang akan datang akan kami usahakan lebih baik dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Semoga dengan dibuatnya Laporan Keuangan ini,kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Tuapeja, 25 Januari 2024
Kepala Dinas

Dominikus Saleleubaja, S.Pd, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19741006 200112 1003